

## ABSTRAK

**YULIANTIKA NIM: E.1610171 “Tugas dan Tanggungjawab Seksi Hukum Polres Metro Depok Dalam Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri”. Skripsi Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2023.**

Seringkali hak-hak anggota Polri secara legalitas formal tidak diperhatikan dan kurang mendapatkan jaminan perlindungan, seolah-olah sirna dan hilang karena kewajiban profesinya, yakni sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Batas-batas menjalankan kewajiban profesi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi hak-hak perlindungan bagi pemegang profesi dikesampingkan, sehingga kurang adanya keseimbangan antara perlindungan hukum dan kewajiban dalam menjalankan profesi. Oleh sebab itu, anggota Polri dan PNS di kepolisian berhak mendapatkan bantuan hukum atas pelanggaran yang terjadi pada dirinya maupun keluarganya. Hal ini juga berlaku di lingkungan Polres Metro Depok, dimana setiap anggota Kepolisian dan PNS yang berada di Polres Metro Depok berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis normatif atau biasa dikenal dengan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu metode perbandingan hukum. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan bantuan hukum kepada anggota Polres Metro Depok yang berhadapan dengan hukum di dasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI. Menurut hukum daya berlakunya Peraturan Kapolri juga berlaku di pengadilan maupun di luar pengadilan, termasuk apabila anggota POLRI dan keluarganya memiliki permasalahan hukum yang berkaitan dengan masyarakat umum. Dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yaitu berasal dari faktor internal dan faktor eksternal yaitu terbatasnya sumber daya manusia dalam melaksanakan, Anggaran yang kurang memadai, kurangnya informasi serta sosialisasi yang dilakukan oleh Sikum Polres Metro Depok kepada anggota kepolisian dan/atau terhadap keluarganya. Adapun faktor eksternal yaitu terdiri dari kurangnya kesadaran anggota Polri Polres Metro Depok untuk mendapatkan bantuan hukum serta regulasi yang bertentangan dan tumpang tindih kewenangan masih terjadi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Adapun upaya yang dilakukan diantaranya yaitu memberikan sosialisasi kepada anggota Polres Metro Depok, melengkapi sarana dan prasarana, melakukan perekrutan anggota yang memiliki latar belakang pendidikan hukum, mengirimkan anggota untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait dengan bantuan hukum dan kompetensi sejenis yang dapat mendukung bidang tugas pemberian bantuan hukum, serta melakukan kerjasama dengan Advokat profesional dalam memberikan bantuan hukum bagi anggota Polri di lingkungan Polres Metro Depok.

**Kata Kunci :** Seksi Hukum, Tanggungjawab, Bantuan Hukum

## ABSTRACT

***YULIANTIKA NIM: E.1610171 "Duties and Responsibilities of the Legal Section of the Depok Metro Police in Legal Assistance for Police Members". Essay for the Legal Study Program, Faculty of Law, Djuanda University, Bogor, 2023.***

*Often the rights of members of the National Police in formal legality are not considered and the corals get a guarantee of protection, as if they were lost because of their professional obligations, namely as law enforcers, protectors and public servants. The limits of carrying out professional obligations have been regulated in laws and regulations, but protection rights for professional holders have been set aside, resulting in a lack of balance between legal protection and obligations in carrying out the profession. Therefore, members of the Police and civil servants in the police have the right to get legal assistance for violations that occur to themselves and their families. This also applies to the Depok Metro Police, where every member of the Police and civil servants who are at the Depok Metro Police have the right to receive legal assistance. The approach used in this study is the normative juridical approach or commonly known as the statute approach, namely the comparative law method. Based on the results of the research, it can be seen that the implementation of legal aid services for members of the Depok Metro Police who are dealing with judges is based on the Chief of Police Regulation Number 2 of 2017 concerning Procedures for Providing Legal Assistance by POLRI According to the legal force of the Rules of the Chief of Police also apply in court and outside the court, including if POLRI members and their families have legal problems related to the general public. In its implementation, there are obstacles, namely originating from internal factors and external factors, namely limited human resources in implementing it, inadequate budget, lack of information and socialization carried out by Sikum Polres Metro Depok to members of the police and or to their families. As for the external factors, namely consisting of the lack of awareness of members of the Polres Metro Depok Police to obtain legal assistance as well as conflicting regulations and overlapping authorities that still occur in the implementation of the provision of legal aid. The efforts made include providing socialization to members of the Polres Metro Depok, completing facilities and infrastructure, recruiting members who have a legal educational background, sending members to attend education and training related to legal aid and similar competencies that can support the field of assignment of assistance. law, as well as collaborating with professional advocates in providing legal assistance to members of the National Police in the Depok Metro Police.*

*Keywords: Legal Section, Responsibility, Legal Aid*